



Strategi Kebijakan Pendidikan Berkualitas pada Madrasah Aliyah Negeri di Papua

Policy Strategies for Delivering Quality Education in State Islamic Senior High Schools in Papua

Dwiharjanto

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua

*Penulis Korespondensi: dwie822004@gmail.com

Riwayat Artikel	Accepted	Revised	Approved
	June 04, 2025	July 02, 2025	July 30, 2025

Berita Artikel

Kata Kunci

Akses dan Mutu Pendidikan;
Kebijakan Pendidikan;
Pendidikan Berkualitas;
Strategi Kebijakan;

Abstrak

Makalah Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisa strategi kebijakan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Papua dalam upaya mewujudkan pendidikan berkualitas di tengah berbagai keterbatasan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen kebijakan pendidikan, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan seperti kepala madrasah, penanggung jawab data, serta melakukan observasi partisipatif di beberapa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang tersebar di wilayah Papua. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-interpretatif, dengan fokus pada identifikasi pola-pola kebijakan, tantangan implementasi, dan dampak yang dihasilkan. Analisis mendalam dilakukan untuk memahami konteks sosio-kultural dan geografis Papua yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Makalah Kebijakan ini juga mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dengan kebutuhan riil di lapangan serta mengidentifikasi potensi inovasi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan. Temuan dari Makalah Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Papua, dengan tujuan akhir meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi generasi muda di wilayah tersebut. Berdasarkan analisis dan pembahasan, penulis mengusulkan kebijakan optimalisasi anggaran dan tata kelola infrastruktur untuk menjawab problem statement. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua diharap dapat menginisiasi usulan anggaran yang progresif untuk memenuhi fasilitas pendukung satuan pendidikan.

Keywords

Access to and the Quality of Education;
Policy Education;
Policy Strategy;
Quality Education;

Abstract

This Policy Paper is written to analyze the education policy strategy of State Islamic Senior High Schools (MAN) in Papua to realize quality education amidst various limitations. The approach used is qualitative with data collection techniques including the study of education policy documents, in-depth interviews with stakeholders such as madrasah principals, persons in charge of data, and conducting participatory observations in several State Islamic Senior High Schools (MAN) spread across the Papua region. The collected data are analyzed descriptively-interpretatively, with a focus on identifying policy patterns, implementation challenges, and the resulting impacts. A more detailed analysis is conducted to understand the socio-cultural and geographical context of

Papua that influences the effectiveness of the policy. This Policy Paper also evaluates the suitability between the formulated policies and real needs in the field and identifies potential innovations that can be applied to overcome obstacles. The findings of this Policy Paper are expected to provide constructive recommendations for the development of education policies of State Islamic Senior High Schools (MAN) in Papua, with the ultimate goal of increasing access and quality of education for the younger generation in the region. Based on the analysis and discussion, the author proposes a policy of optimizing the budget and infrastructure governance to answer the problem statement. The Head of the Papua Province Ministry of Religion Regional Office is expected to initiate a progressive budget proposal to fulfill supporting facilities for educational units.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Isu krusial terkait rendahnya kualitas pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Provinsi Papua jika dibandingkan dengan provinsi lain bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari kompleksitas aspek yang meliputi aspek geografis, sosial, dan historis yang mempengaruhi akses serta mutu pendidikan di wilayah paling timur Indonesia ini. Kesenjangan ini menciptakan disparitas yang signifikan, berdampak langsung pada masa depan generasi muda Papua dan potensi pembangunan daerah secara keseluruhan.

Salah satu akar masalah terletak pada keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang memadai. Banyak Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Papua masih bergulat dengan kondisi bangunan yang kurang layak, minimnya ketersediaan ruang kelas yang representatif, serta keterbatasan akses terhadap listrik dan air bersih. Hal ini secara langsung mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar, menjadikannya tantangan besar bagi siswa dan guru (Jurnal Pendidikan Islam. 2022). Ketersediaan fasilitas laboratorium, perpustakaan dengan koleksi buku yang memadai, serta sarana olahraga yang layak juga masih menjadi mimpi di banyak Madrasah Aliyah Negeri MAN di Papua, jauh tertinggal dibandingkan dengan standar yang ada di provinsi-provinsi maju di Jawa atau Sumatera

Isu lain yang tak kalah penting adalah ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) guru. Banyak Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Papua mengalami kekurangan guru, terutama untuk mata pelajaran spesifik. Lebih dari itu, kualifikasi dan kompetensi guru yang ada pun seringkali belum sesuai dengan standar yang diharapkan. Program pelatihan dan pengembangan profesional guru yang berkelanjutan masih belum merata dan optimal, sehingga inovasi dalam pembelajaran serta penerapan kurikulum yang relevan menjadi terhambat (Jurnal Studi Pendidikan Islam 2021). Kondisi ini diperparah dengan tingkat rotasi guru yang tinggi di daerah terpencil, menyulitkan pembangunan kontinuitas dan stabilitas dalam proses pendidikan.

Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi kendala serius. Di era digital ini, akses internet yang stabil dan perangkat teknologi yang memadai menjadi krusial untuk mendukung pembelajaran modern. Namun, banyak Madrasah Aliyah

Negeri (MAN) di Papua yang masih kesulitan mengakses internet, apalagi memiliki fasilitas komputer atau perangkat digital lainnya yang mencukupi. Kesenjangan digital ini semakin memperlebar jurang kualitas pendidikan, menghambat siswa dalam mengakses informasi dan sumber belajar yang lebih luas (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam 2023).

Selain itu, kurikulum yang diterapkan seringkali belum sepenuhnya relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat Papua. Meskipun kurikulum nasional berlaku, penyesuaian yang minim terhadap karakteristik sosial budaya dan lingkungan setempat dapat membuat materi pelajaran terasa asing bagi siswa. Kurangnya bahan ajar yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal juga menjadi penghambat dalam menumbuhkan minat belajar dan pemahaman yang mendalam (Jurnal Pendidikan Madrasah 2020).

Faktor geografis dan demografis turut berperan dalam memperparah rendahnya kualitas pendidikan. Wilayah Papua yang luas dengan medan yang sulit, serta sebaran penduduk yang jarang, menyebabkan akses ke sekolah menjadi tantangan tersendiri. Banyak siswa harus menempuh jarak yang jauh dengan kondisi jalan yang tidak memadai, bahkan berbahaya, untuk mencapai Madrasah Aliyah Negeri (MAN) terdekat. Hal ini berkontribusi pada tingkat kehadiran siswa yang tidak konsisten dan bahkan angka putus sekolah yang relatif tinggi (Jurnal Geografi Papua 2022).

Dukungan dan partisipasi masyarakat serta orang tua dalam pendidikan juga perlu menjadi perhatian. Kesadaran akan pentingnya pendidikan formal kadang kala masih rendah di beberapa komunitas, atau terhalang oleh keterbatasan ekonomi. Keterlibatan orang tua dalam memantau dan mendukung proses belajar anak di rumah masih belum optimal, yang juga memengaruhi motivasi dan prestasi siswa (Jurnal Sosiologi Pendidikan 2021).

Alokasi anggaran dan efektivitas penggunaannya juga menjadi sorotan. Meskipun ada upaya peningkatan anggaran pendidikan, optimalisasi dan transparansi dalam penggunaannya masih menjadi pekerjaan rumah. Dana yang terbatas seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar sekolah, apalagi untuk pengembangan inovasi dan peningkatan kualitas secara menyeluruh (Jurnal Kebijakan Publik 2023). Distribusi anggaran yang tidak merata juga bisa menyebabkan ketimpangan terjadi antar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Papua.

Kebijakan pendidikan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kekhususan Papua juga menjadi isu penting. Pendekatan yang terlalu sentralistik tanpa mempertimbangkan konteks lokal Papua dapat menciptakan kesenjangan dalam implementasi program pendidikan. Diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan berpihak pada karakteristik unik wilayah dan masyarakat Papua (Jurnal Hukum dan Pendidikan 2022).

Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada rendahnya capaian akademik siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Papua jika dibandingkan dengan provinsi lain. Hasil Ujian Nasional atau evaluasi pembelajaran menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa Papua masih di bawah rata-rata nasional, terutama pada mata pelajaran sains dan matematika (Jurnal Evaluasi Pendidikan 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung belum mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang setara.

Implikasi dari rendahnya kualitas pendidikan ini sangat luas. Lulusan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dari Papua akan menghadapi daya saing yang lebih rendah dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Kesenjangan ini berpotensi memperpetakan kemiskinan dan keterbelakangan di Papua, menghambat mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat (Jurnal Pembangunan Sosial 2023).

Apabila tidak segera diatasi, rendahnya kualitas pendidikan ini akan menjadi penghalang utama bagi pembangunan berkelanjutan di Papua. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah kunci utama kemajuan, dan tanpa itu, potensi ekonomi, sosial, dan budaya Papua tidak akan dapat teraktualisasi secara optimal. Kualitas pendidikan yang rendah juga dapat memicu permasalahan sosial lainnya, seperti pengangguran dan kriminalitas.

Oleh karena itu, permasalahan rendahnya kualitas pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Provinsi Papua bukan sekadar isu sektoral, melainkan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan multi-sektoral. Dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak untuk mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pentingnya melakukan kajian-kajian juga tidak bisa diabaikan. Data dan informasi yang akurat mengenai kondisi riil di lapangan sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan intervensi yang efektif. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang akar masalah, upaya perbaikan akan sulit mencapai hasil yang signifikan (Jurnal Penelitian Pendidikan. 2020).

akhirnya, permasalahan rendahnya kualitas pendidikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Papua merupakan tantangan besar yang memerlukan perhatian serius. Dengan mengatasi isu-isu fundamental seperti infrastruktur, kualitas guru, akses teknologi, relevansi kurikulum, serta faktor geografis dan sosial, diharapkan kualitas pendidikan di MAN Papua dapat setara dengan provinsi lain, sehingga mampu mencetak generasi muda Papua yang cerdas, kompeten, dan berdaya saing, untuk kemajuan bangsa dan daerah (Jurnal Pendidikan Islam 2024).

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah rendahnya kualitas pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Provinsi Papua dapat diidentifikasi antara lain :

1. Kurangnya Infrastruktur pendukung pembelajaran serta sulitnya aksesibilitas lokasi satuan pendidikan

Di Papua, kurangnya infrastruktur pendukung pembelajaran pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) menjadi hambatan krusial, di mana fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, hingga akses listrik dan air bersih seringkali jauh dari standar. Kondisi ini diperparah dengan sulitnya aksesibilitas lokasi satuan pendidikan, mengingat geografi Papua yang didominasi pegunungan, hutan lebat, dan sungai-sungai besar. Akibatnya, kehadiran siswa sering tidak stabil dan distribusi guru berkualitas menjadi sangat terbatas, menciptakan disparitas signifikan dalam kualitas pendidikan dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

2. Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik

Kualitas pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Papua juga sangat dipengaruhi oleh rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik. Seringkali, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di wilayah ini menghadapi kekurangan guru, terutama untuk mata pelajaran yang spesifik atau bidang keahlian tertentu, membuat beban mengajar guru yang ada menjadi tidak proporsional. Lebih jauh lagi, kompetensi sebagian guru yang bertugas belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan, baik dari sisi penguasaan materi pelajaran, metodologi pengajaran, maupun pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Minimnya program pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan serta insentif yang kurang menarik bagi guru untuk bertugas di daerah terpencil Papua, memperparah masalah ini, sehingga inovasi dan peningkatan mutu pembelajaran menjadi terhambat.

3. Kurang mendukungnya faktor sosial, budaya dan keamanan

Faktor sosial, budaya, dan keamanan di Papua juga secara signifikan menghambat kemajuan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Secara sosial dan budaya, beberapa komunitas mungkin memiliki prioritas atau pandangan yang berbeda terhadap pendidikan formal, terkadang mengutamakan kegiatan adat atau mata pencarian tradisional, sehingga partisipasi aktif dalam pendidikan menjadi kurang optimal. Hal ini diperparah dengan situasi keamanan yang sering tidak stabil di beberapa wilayah, di mana konflik atau insiden keamanan dapat menyebabkan gangguan belajar-mengajar, penutupan sekolah sementara, hingga pengungsian. Lingkungan yang tidak kondusif ini menciptakan rasa tidak aman bagi siswa dan guru, menghambat proses pembelajaran yang berkelanjutan dan memengaruhi motivasi peserta didik untuk datang ke sekolah.

4. Rendahnya tata kelola dan kebijakan satuan pendidikan

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Papua juga dihadapkan pada praktik manajemen yang belum optimal, mulai dari perencanaan program yang kurang strategis, pengelolaan anggaran yang belum efisien dan transparan, hingga sistem monitoring dan evaluasi yang tidak berjalan dengan baik. Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait, baik di tingkat daerah maupun nasional, seringkali belum sepenuhnya adaptif terhadap konteks spesifik dan tantangan unik di Papua. Hal ini bisa berarti kurangnya otonomi dalam pengambilan keputusan di tingkat sekolah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, atau program-program yang digulirkan tidak relevan dengan kondisi riil di lapangan, sehingga implementasi yang efektif menjadi sulit tercapai dan berdampak pada kualitas pembelajaran secara keseluruhan.

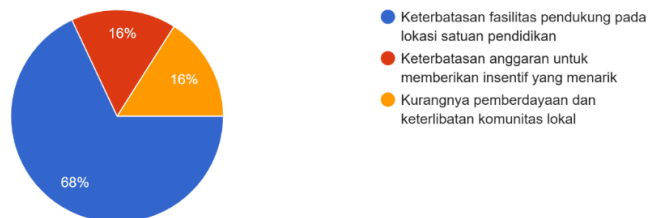
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan masalah utama dengan menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG), yang menunjukkan bahwa “rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik” mendapatkan skor tertinggi” (lihat lampiran 1) sekaligus menjadi akar masalah yang digambarkan dalam bentuk diagram fishbone berikut ini.



Gambar 1. Pohon Masalah Penulisan *Policy Paper*

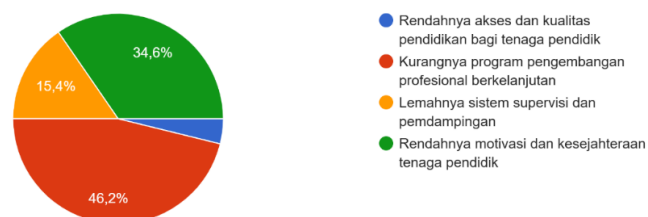
Untuk menganalisa akar masalah yang sudah dibuat, maka penulis makalah kebijakan telah melakukan survey terbatas, yang ditujukan bagi para tenaga pendidik pada Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Papua dengan periode rentang waktu 24 - 26 Mei 2025 dengan hasil sebagai berikut:

Penyebab Masalah Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik adalah Kesulitan penempatan dan retensi tenaga pendidik di daerah terpencil
25 jawaban



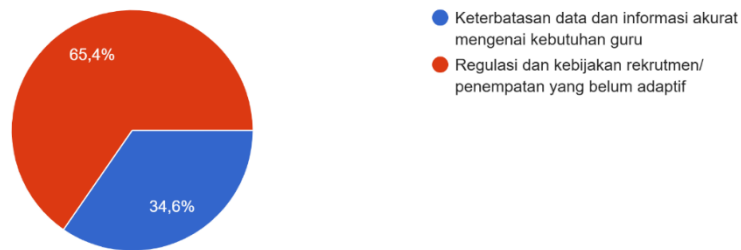
Gambar 2. Diagram Lingkaran Survei Akar Masalah “Kesulitan Penempatan dan Retensi Tenaga Pendidik di Daerah Terpencil”

Penyebab Masalah Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik adalah Rendahnya kualitas tenaga pendidik
26 jawaban



Gambar 3. Diagram Lingkaran Survei Akar Masalah “Rendahnya Kualitas Tenaga Pendidik”

Penyebab Masalah Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik adalah Belum efektifnya sistem rekrutmen dan penempatan tenaga pendidik
26 jawaban



Gambar 4. Diagram Lingkaran Survei Akar Masalah “Belum Efektifnya Sistem Rekrutment dan Penempatan Tenaga Pendidik”

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan hasil survey di atas, maka yang menjadi *problem statement* dalam makalah kebijakan ini adalah rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dikarenakan terdapat kesulitan dalam penempatan dan retensi tenaga pendidik di daerah terpencil yang diakibatkan keterbatasan fasilitas pendukung pada lokasi satuan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Papua.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Untuk mengurai secara mendalam akar permasalahan, kompleksitas, dan berbagai dimensi yang terkait tema rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Provinsi Papua.
2. Untuk merumuskan dan menyajikan pilihan-pilihan kebijakan yang dilengkapi dengan argumentasi dan justifikasi yang kuat.
3. Untuk menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi kepada para pengambil kebijakan serta pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mempertimbangkan perspektif dan bukti yang disajikan dalam proses pembuatan kebijakan.
4. Untuk menambah wawasan teoretis dan metodologis dalam studi kebijakan publik.

Manfaat Kajian:

1. Menyajikan analisis yang didukung oleh data, survei, dan argumentasi yang logis, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan terpercaya mengenai tema rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Provinsi Papua.
2. Menyajikan berbagai alternatif kebijakan dan analisis dampaknya.

3. Membantu pembuat kebijakan dalam membuat keputusan yang lebih berdasar data dan fakta.
4. Kebijakan yang akan diterapkan akan menjadi lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan lebih efektif dalam mencapai tujuannya.
5. Dengan menawarkan perspektif baru dan alternatif yang kreatif, makalah kebijakan kebijakan dapat memicu inovasi dalam perumusan solusi terhadap masalah-masalah kebijakan.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Teori Lingkungan Belajar (*Learning Environment Theory*)

Teori Lingkungan Belajar (*Learning Environment Theory*) menekankan bahwa kualitas dan karakteristik lingkungan tempat pembelajaran berlangsung memiliki dampak signifikan terhadap hasil belajar siswa. Teori ini memandang lingkungan belajar tidak hanya sebagai lokasi fisik semata, tetapi juga mencakup dimensi-dimensi yang lebih luas, seperti iklim sosial-emosional, interaksi antara siswa dan guru, ketersediaan sumber daya, serta budaya dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Artinya, faktor-faktor di luar kurikulum dan metode pengajaran langsung, seperti rasa aman, dukungan, fasilitas, dan hubungan interpersonal, secara kolektif membentuk pengalaman belajar siswa dan memengaruhi motivasi, keterlibatan, serta pencapaian akademik mereka.

Dalam konteks teori ini, lingkungan belajar yang efektif adalah yang mendukung pertumbuhan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Ini berarti lingkungan tersebut harus mendorong interaksi positif, memberikan kesempatan untuk eksplorasi dan penemuan, menyediakan sumber daya yang memadai, dan menciptakan atmosfer yang memicu rasa ingin tahu serta kepercayaan diri. Sebaliknya, lingkungan belajar yang negatif misalnya, kurangnya dukungan, fasilitas yang buruk, atau iklim yang tidak aman dapat menghambat proses belajar, menurunkan motivasi, dan pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas hasil belajar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, perbaikan harus menyentuh seluruh aspek lingkungan belajar, tidak hanya berfokus pada materi pelajaran atau kompetensi guru.

2. Teori Ekuitas dan Akses Pendidikan (*Equity and Access in Education*)

Teori Ekuitas dan Akses Pendidikan menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, geografis, ras, gender, atau kondisi fisik, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Ini bukan sekadar tentang menyediakan kursi di sekolah, tetapi juga memastikan bahwa semua siswa memiliki sumber daya, dukungan, dan pengalaman belajar yang setara untuk mencapai potensi penuh mereka. Ketidakadilan dalam akses pendidikan dapat muncul dari berbagai bentuk, mulai dari ketersediaan sekolah yang tidak merata, kualitas guru yang timpang, hingga kurikulum yang tidak relevan atau diskriminatif, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi.

Konsep ekuitas melampaui kesetaraan sederhana, karena mengakui bahwa siswa dengan kebutuhan yang berbeda mungkin memerlukan dukungan yang berbeda pula untuk mencapai hasil yang setara. Misalnya, siswa di daerah terpencil atau dengan kondisi disabilitas mungkin memerlukan investasi atau pendekatan khusus agar mereka dapat mengakses dan berhasil dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, teori ini mendorong kebijakan dan praktik yang proaktif untuk mengatasi hambatan sistemik dan historis yang menghalangi kelompok-kelompok tertentu dari pendidikan berkualitas. Tujuannya adalah menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap keberagaman, sehingga semua individu dapat berkontribusi secara bermakna bagi masyarakat.

3. Teori Pembangunan Infrastruktur (*Infrastructure Development Theory*)

Teori Pembangunan Infrastruktur, dalam konteks pendidikan, menegaskan bahwa ketersediaan dan kualitas sarana fisik merupakan fondasi esensial bagi proses belajar-mengajar yang efektif dan pencapaian tujuan pendidikan. Teori ini memandang infrastruktur pendidikan tidak hanya sebagai bangunan fisik semata, tetapi juga mencakup fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, toilet yang layak, akses listrik dan air bersih, serta konektivitas internet. Investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang memadai secara langsung memengaruhi lingkungan belajar, menciptakan kondisi yang kondusif bagi siswa untuk menyerap materi, berinteraksi, dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Tanpa infrastruktur dasar yang memadai, bahkan guru yang paling berkualitas pun akan kesulitan menyampaikan pembelajaran secara efektif.

Lebih lanjut, teori ini juga menyoroti bahwa infrastruktur pendidikan harus direncanakan dan dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik lokasi dan pengguna. Ini berarti bahwa di daerah seperti Papua, di mana kondisi geografis dan aksesibilitas menjadi tantangan besar, pembangunan infrastruktur tidak bisa disamakan dengan di wilayah perkotaan yang padat. Diperlukan pendekatan yang adaptif, inovasi dalam desain, dan penggunaan material yang sesuai dengan kondisi lokal untuk memastikan bangunan sekolah tidak hanya fungsional tetapi juga berkelanjutan dan mudah dijangkau. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang strategis dan relevan adalah prasyarat penting untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan memastikan akses yang adil terhadap pembelajaran berkualitas bagi semua siswa.

Kerangka Konseptual

1. Pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan

Pembangunan infrastruktur sejatinya harus berangkat dari identifikasi kebutuhan spesifik masyarakat dan lokasi yang akan dilayani, bukan sekadar proyek pembangunan umum. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap investasi infrastruktur memberikan dampak yang optimal dan relevan. Sebagai contoh, dalam konteks pembangunan fasilitas pendidikan di Papua, pemahaman mendalam terhadap kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang unik di setiap daerah menjadi krusial. Wilayah pegunungan mung-

kin memerlukan desain bangunan yang tahan gempa dan akses jalan yang memadai, sementara daerah pesisir membutuhkan pertimbangan terhadap risiko banjir atau abrasi. Selain itu, aspek sosial budaya seperti bahasa lokal dan adat istiadat perlu diintegrasikan ke dalam desain dan kurikulum pendidikan agar fasilitas yang dibangun benar-benar inklusif dan diterima oleh masyarakat setempat.

Melanjutkan pemikiran tersebut, pembangunan sekolah di Papua tidak bisa disamaratakan. Di suatu daerah yang mayoritas penduduknya adalah suku Dani, misalnya, fasilitas pendidikan mungkin perlu dilengkapi dengan asrama karena jarak rumah siswa yang jauh, serta kurikulum yang mengakomodasi kearifan lokal dan bahasa ibu sebagai pengantar di tahap awal. Berbeda halnya dengan daerah perkotaan seperti Jayapura yang mungkin memerlukan fasilitas dengan teknologi lebih maju dan akses internet yang stabil untuk mendukung pembelajaran digital. Oleh karena itu, investasi pada tahap perencanaan dan survei lapangan menjadi sangat penting, untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun bukan hanya berdiri megah, tetapi juga berfungsi secara optimal dan berkelanjutan, menjawab tantangan dan potensi unik di setiap jengkal tanah Papua.

2. Distribusi sumber daya dan layanan secara adil

Konsep distribusi sumber daya dan layanan secara adil di seluruh wilayah geografis adalah fondasi bagi pembangunan yang inklusif dan merata. Intinya, kita ingin memastikan bahwa lokasi atau jarak tidak lagi menjadi hambatan utama bagi siapa pun untuk mengakses layanan dasar, termasuk pendidikan. Bayangkan, seorang anak di daerah terpencil Papua seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas seperti anak yang tinggal di pusat kota. Ini bukan hanya tentang membangun gedung sekolah di setiap pelosok, tapi juga memastikan ketersediaan guru yang kompeten, kurikulum yang relevan, serta fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan akses internet. Penerapan konsep ini menuntut pendekatan yang holistik, mempertimbangkan aspek geografis, demografis, dan sosio-ekonomi untuk menciptakan ekosistem layanan yang benar-benar menjangkau semua lapisan masyarakat, di mana pun mereka berada.

Untuk mewujudkan keadilan akses tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif. Misalnya, di daerah dengan kepadatan penduduk rendah, pemerintah bisa mempertimbangkan model sekolah berasrama atau penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh untuk mengatasi kendala geografis. Sementara di wilayah padat penduduk, fokusnya mungkin lebih pada peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas yang sudah ada. Konsep ini juga melibatkan upaya untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda. Dengan demikian, setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau lokasi tempat tinggal, memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi diri melalui akses pendidikan yang memadai, sehingga tercipta masyarakat yang lebih berdaya dan sejahtera secara keseluruhan.

3. Kemitraan publik-swasta-komunitas

Kompleksitas masalah pembangunan dapat diurai dan diatasi jauh lebih efektif melalui kolaborasi erat antara pemerintah (publik), sektor swasta, dan komunitas lokal. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, menciptakan iklim kebijakan yang kondusif, menyediakan kerangka hukum, dan mungkin juga mengalokasikan sumber daya awal. Sektor swasta, dengan inovasi, keahlian teknis, dan kapasitas finansialnya, dapat menghadirkan solusi-solusi praktis dan efisien, seringkali dengan kecepatan yang tidak dimiliki oleh birokrasi publik. Sementara itu, komunitas lokal membawa pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan kearifan setempat, memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan relevan, berkelanjutan, dan diterima oleh penerima manfaat. Sinergi ketiga pihak ini membentuk sebuah ekosistem dinamis yang mendorong penciptaan nilai, inovasi, dan solusi yang lebih komprehensif.

Dalam konteks pembangunan di Papua, penerapan model Triple Helix ini sangat relevan. Misalnya, dalam mengatasi masalah pendidikan, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang mendukung, sektor swasta dapat berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur sekolah atau penyediaan teknologi pendidikan, dan komunitas lokal dapat berkontribusi dalam pengawasan, pemeliharaan, serta integrasi nilai-nilai budaya dalam proses belajar mengajar. Kolaborasi ini tidak hanya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap program pembangunan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan tidak hanya efektif dalam mengatasi masalah pembangunan yang kompleks, tetapi juga lebih berkelanjutan karena adanya partisipasi aktif dan dukungan dari semua pemangku kepentingan.

4. Pemeliharaan berkelanjutan dan kapasitas lokal

Keberlanjutan dan pemeliharaan jangka panjang dari aset-aset yang telah dibangun. Ini berarti bahwa setiap proyek, entah itu sekolah, fasilitas kesehatan, atau infrastruktur air bersih, tidak hanya harus dibangun dengan kokoh, tetapi juga harus direncanakan agar dapat dirawat dan dioperasikan oleh komunitas lokal. Fokusnya bergeser dari “apa yang kita bangun” menjadi “bagaimana kita memastikan ini terus berfungsi”. Aspek kunci di sini adalah pengembangan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya lokal, baik itu dalam hal keterampilan teknis untuk perbaikan, sistem pengelolaan finansial untuk operasional, maupun pembentukan kelompok masyarakat yang bertanggung jawab atas aset tersebut. Tanpa perencanaan pemeliharaan yang matang, pembangunan awal, seindah apapun, bisa menjadi sia-sia seiring berjalannya waktu.

Oleh karena itu, sebelum sebuah bata diletakkan, perlu dipikirkan secara matang siapa yang akan menjaga aset ini di masa depan, bagaimana mereka akan melakukannya, dan sumber daya apa yang mereka butuhkan. Di daerah seperti Papua, di mana akses dan logistik bisa menjadi tantangan, mengandalkan kapasitas lokal menjadi sangat vital. Ini bisa berarti melatih warga setempat dalam keterampilan dasar pemeliharaan bangunan, membentuk komite pengelola sekolah, atau bahkan mengembangkan model bisnis mikro untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk pemeliharaan. Dengan demikian, investasi awal tidak hanya menciptakan fasilitas, tetapi juga menumbuhkan

kemandirian dan rasa kepemilikan di tengah masyarakat, memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi.

METODOLOGI

Makalah kebijakan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-interpretatif. untuk mengevaluasi terkait problem statement Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dikarenakan terdapat kesulitan dalam penempatan dan retensi tenaga pendidik di daerah terpencil yang diakibatkan keterbatasan fasilitas pendukung pada lokasi satuan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Papua. Data dikumpulkan melalui studi dokumen kebijakan pendidikan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, serta studi literatur. Studi dokumen ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang relevan, menganalisis tujuan dan sasaran kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan.

Penulis juga melakukan pengambilan data dan informasi melalui proses wawancara yang dilakukan pada stakeholder antara lain kepala madrasah serta penanggung jawab data. Hal ini dilakukan untuk menggali lebih dalam data terkait deskripsi madrasah.

Selain penelusuran data sekunder melalui studi dokumen diatas, penulis makalah kebijakan ini juga mengadopsi pendekatan survei primer. Survei ini dilaksanakan dengan menyebarkan formulir elektronik kepada seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik yang bertugas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Provinsi Papua. Penggunaan formulir elektronik dipilih untuk memfasilitasi pengumpulan data yang efisien dan menjangkau responden yang tersebar secara geografis di wilayah tersebut, memungkinkan pemerolehan informasi langsung mengenai perspektif dan pengalaman mereka terkait topik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tahun 2022, Provinsi Papua dimekarkan menjadi 4 Provinsi antara lain Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah. Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Papua setelah dimekarkan berubah dari awalnya 28 kabupaten dan 1 kota menjadi hanya tersisa 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kota Jayapura.

Berdasarkan sumber data Statistik 2024 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua, Jumlah Madrasah Aliyah di Provinsi Papua berjumlah 13 satuan pendidikan dengan rincian sebagaimana tabel berikut. (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua 2025)

Tabel 1. Jumlah Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Papua

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Madrasah Aliyah
1	Kota Jayapura	8

2	Kabupaten Jayapura	3
3	Kabupaten Keerom	2

Sumber : Statistik 2024 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua

Dari jumlah madrasah Aliyah tersebut, jumlah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Di Provinsi Papua hanya 2 (dua) satuan pendidikan, yaitu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Keerom yang berada di Kabupaten Keerom dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Jayapura yang berlokasi di Kabupaten Jayapura. Kedua madrasah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) ini memegang peranan yang sangat penting dalam menyediakan pendidikan menengah berciri khas Islam bagi masyarakat di Provinsi Papua.

Pertama, Madrasah Aliyah Negeri Keerom, merupakan memperoleh status negeri ditahun 2017 dengan Nomor Statistik Madrasah 131291110002, berlokasi di Jalan Poros Arso III Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom yang dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari kota Jayapura selama \pm 3 jam.

Berdasarkan update data emis 31 Desember 2024 diperoleh data Jumlah siswa di Madrasah Aliyah Negeri Keerom adalah 177 orang, terdiri dari 80 siswa laki-laki dan 97 siswa perempuan. Madrasah ini memiliki 9 rombongan belajar. Tenaga pendidik yang mengajar berjumlah 34 orang, dengan rincian 17 guru laki-laki dan 17 guru perempuan. Selain itu, terdapat 5 tenaga kependidikan, yaitu 3 laki-laki dan 2 perempuan. Fasilitas sekolah mencakup 18 ruang belajar dan 16 ruang lain, yang semuanya dalam kondisi baik.

Kedua, Madrasah Aliyah Negeri Jayapura memperoleh status negeri ditahun 2015 dengan Nomor Statistik Madrasah 13119103001, berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto Blok E Barat Nimbokrang I, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura yang dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari kota Jayapura selama \pm 3 jam.

Berdasarkan update data emis 31 Desember 2024 diperoleh data Madrasah Aliyah Negeri Jayapura ini memiliki total 72 siswa, dengan 32 siswa laki-laki dan 40 siswa perempuan, yang terbagi dalam 5 rombongan belajar. Staf pengajar terdiri dari 18 guru, di mana 6 adalah laki-laki dan 12 perempuan. Selain itu, terdapat 7 tenaga kependidikan, yaitu 2 laki-laki dan 5 perempuan. Fasilitas belajar mencakup 5 ruang belajar dan 20 ruang lain, yang semuanya dalam kondisi baik.

Selain data emis tersebut, penulis juga melakukan wawancara langsung kepada stakeholder yaitu kepala madrasah serta penanggung jawab data di masing-masing madrasah aliyah negeri. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di peroleh data sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah rombongan belajar tiap tingkatan kelas

No	Tingkatan kelas	Madrasah Aliyah Negeri Keerom	Madrasah Aliyah Negeri Jayapura
1	Kelas X	3 rombel	2 rombel
2	Kelas XI	3 rombel	2 romber
3	Kelas XII	3 romber	1 rombel

Sumber : Wawancara Stakeholder

Tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Negeri baik di Keerom maupun Jayapura menunjukkan komposisi yang beragam; separuhnya adalah pendatang yang jauh dari keluarga, sementara separuhnya lagi merupakan penduduk setempat. Khusus di MAN Keerom, terdapat kelebihan tenaga pengajar pada mata pelajaran agama (jumlah guru 8, kebutuhan 4) dan bahasa Inggris (jumlah guru 4, kebutuhan 2). Akibatnya, beberapa guru menerima nota dinas untuk mengajar di madrasah swasta di sekitar wilayah tersebut.

Sementara itu, tantangan mobilitas dihadapi oleh tiga tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Negeri Jayapura yang setiap hari harus menempuh perjalanan 2,5 hingga 3 jam dari rumah mereka di Sentani ke madrasah. Kedua madrasah aliyah negeri ini juga tidak menyediakan fasilitas rumah dinas bagi para tenaga pendidik. Selain itu, di MAN Jayapura, ditemukan kekurangan guru yang memiliki kualifikasi linear untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Bimbingan Konseling (BK), sehingga mata pelajaran tersebut sementara diampu oleh guru yang ada.

Berdasarkan data primer yang diperoleh tersebut, maka penulis mencoba untuk melakukan analisis.

1. Rasio jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar

Berdasarkan data, emis 31 Desember 2024 maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3. Rasio Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

No	Satuan Pendidikan	Rasio jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar
1	Madrasah Aliyah Negeri Keerom	1 : 19,67
2	Madrasah Aliyah Negeri Jayapura	1 : 14,4

Sumber : Data Diolah

2. Rasio jumlah peserta didik dengan tenaga pendidik

Tabel 4. Rasio Jumlah Peserta Didik dengan Tenaga Pendidik

No	Satuan Pendidikan	Rasio jumlah peserta didik dengan Tenaga Pendidik
1	Madrasah Aliyah Negeri Keerom	1 : 5,2
2	Madrasah Aliyah Negeri Jayapura	1 : 4

Sumber : Data Diolah

Pembahasan

Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, khususnya kesulitan penempatan dan retensi di daerah terpencil akibat keterbatasan fasilitas pendukung, menjadi sangat relevan jika dianalisis bersama data kedua MAN ini. Meskipun secara angka MAN Keerom memiliki jumlah guru yang relatif lebih besar (34 orang) dibandingkan dengan MAN Jayapura (18 orang), perlu ditekankan bahwa kedua madrasah ini, baik MAN Keerom maupun MAN Jayapura, berlokasi di daerah yang memerlukan perjalanan darat sekitar tiga jam dari Kota Jayapura. Lokasi yang tidak mudah dijangkau ini secara otomatis dapat dikategorikan sebagai daerah terpencil, yang secara langsung berimplikasi pada minat guru dan tenaga

kependidikan untuk ditempatkan dan bertahan. Keterbatasan akses dan fasilitas, seperti perumahan layak, listrik, air bersih, hingga akses internet yang stabil, adalah faktor krusial yang seringkali menjadi penghambat utama bagi penempatan guru-guru berkualitas.

Kedua madrasah aliyah negeri tersebut tidak memiliki rumah dinas bagi tenaga pendidikannya. Kondisi ini sering kali menyulitkan guru-guru yang berasal dari luar daerah untuk mencari tempat tinggal yang layak dan terjangkau di sekitar lingkungan sekolah. Akibatnya, mereka mungkin harus menempuh perjalanan jauh setiap hari, yang berpotensi mengurangi efektivitas mengajar dan menguras energi. Selain itu, ketiadaan fasilitas ini juga dapat menjadi hambatan dalam merekrut tenaga pendidik berkualitas, terutama bagi guru-guru yang mencari stabilitas tempat tinggal.

Di Madrasah Aliyah Negeri Keerom, ditemukan adanya kelebihan kualifikasi tenaga pendidik pada beberapa mata pelajaran. Fenomena ini terlihat jelas pada guru agama, di mana terdapat 8 guru padahal kebutuhan idealnya hanya 4. Situasi serupa juga terjadi pada guru bahasa Inggris, dengan 4 guru sementara kebutuhan riil hanya 2.

Kelebihan staf ini menimbulkan tantangan sekaligus peluang. Sebagai respons, beberapa guru yang masuk dalam kategori berlebih tersebut menerima nota dinas untuk mengajar di madrasah swasta sekitar. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada, sekaligus membantu madrasah swasta yang mungkin masih kekurangan tenaga pengajar berkualitas. Dengan demikian, kelebihan guru di satu tempat dapat menjadi solusi atas kekurangan di tempat lain, menciptakan sinergi positif antar lembaga pendidikan di wilayah Keerom.

Meski demikian, kondisi ini juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan kebutuhan guru yang lebih akurat di masa mendatang. Evaluasi berkala terhadap rasio guru dan siswa, serta proyeksi kebutuhan berdasarkan kurikulum dan jumlah rombongan belajar, akan sangat membantu dalam menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga pendidik yang signifikan. Tujuannya adalah memastikan setiap guru ditempatkan secara efektif, sehingga potensi mereka dapat dimaksimalkan untuk kemajuan pendidikan.

Komposisi tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) baik di Keerom maupun Jayapura menunjukkan dinamika yang menarik dan patut diperhatikan. Data menunjukkan bahwa setengah dari total guru yang mengajar di kedua madrasah tersebut adalah pendatang baru atau “perantau”, yang jauh dari keluarga dan kampung halaman mereka. Sementara itu, setengahnya lagi merupakan penduduk setempat yang memiliki akar dan ikatan kuat dengan komunitas di sekitar madrasah.

Kenyataan ini membawa implikasi ganda. Bagi para guru perantau, status mereka sebagai pendatang seringkali berarti mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru, mencari tempat tinggal, dan membangun jaringan sosial dari awal, jauh dari dukungan keluarga. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesejahteraan dan fokus mereka dalam mengajar. Di sisi lain, kehadiran guru-guru perantau ini juga membawa perspektif baru, pengalaman beragam, dan metode pengajaran yang mungkin berbeda, memperkaya khazanah pendidikan di MAN Keerom dan Jayapura.

Sebaliknya, guru-guru lokal yang merupakan penduduk setempat, umumnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial masyarakat sekitar. Kedekatan ini dapat mempermudah mereka dalam berinteraksi dengan siswa dan orang tua, serta membangun hubungan yang kuat dengan komunitas. Namun, mereka juga mungkin dihadapkan pada tantangan lain, seperti tuntutan sosial atau keterbatasan dalam pengembangan diri jika tidak ada fasilitas yang memadai.

Dinamika antara guru perantau dan lokal ini menciptakan lingkungan kerja yang heterogen, yang jika dikelola dengan baik, dapat menjadi kekuatan besar bagi madrasah. Integrasi dan kolaborasi antara kedua kelompok ini sangat penting untuk menciptakan sinergi positif, memastikan transfer pengetahuan dan pengalaman, serta memperkuat kualitas pendidikan di kedua MAN tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pihak madrasah dan pemerintah daerah untuk memperhatikan kebutuhan spesifik dari kedua kelompok guru ini guna memastikan mereka dapat mengajar secara optimal.

Perbandingan rasio guru-siswa juga memberikan gambaran yang menarik terkait isu kuantitas dan kualitas ini. MAN Keerom memiliki rasio sekitar 1 guru untuk 5.2 siswa (177 siswa / 34 guru), sementara MAN Jayapura memiliki rasio sekitar 1 guru untuk 4 siswa (72 siswa / 18 guru). Secara numerik, rasio ini terkesan sangat ideal, bahkan jauh lebih baik dari standar rasio guru-siswa di banyak sekolah di perkotaan. Namun, rasio yang “terlalu ideal” ini justru dapat menjadi indikasi adanya fenomena “penumpukan” guru di lokasi yang relatif lebih mudah dijangkau dalam kategori terpencil, atau sebaliknya, kekurangan siswa. Jika penumpukan guru terjadi, ini bisa berarti ada tenaga pendidik yang mungkin tidak dimanfaatkan secara optimal, atau bahkan mengindikasikan kesulitan penempatan guru di daerah yang terpencil di Papua.

Lebih jauh, data mengenai jumlah rombongan belajar dan ruang belajar juga mengisyaratkan adanya ketidakseimbangan kapasitas dan potensi efisiensi. MAN Keerom memiliki 9 rombongan belajar dengan 18 ruang belajar, yang menunjukkan ketersediaan ruang yang memadai atau bahkan berlebih (dua kali lipat rombongan belajar). Sementara itu, MAN Jayapura memiliki 5 rombongan belajar dengan 5 ruang belajar, yang secara harfiah berarti setiap rombongan belajar memiliki satu ruang, mengindikasikan penggunaan yang efisien namun tanpa fleksibilitas. Kondisi baik pada semua ruang belajar di kedua MAN tersebut memang positif, namun keberadaan fasilitas fisik yang baik belum tentu menarik atau mempertahankan tenaga pendidik jika fasilitas pendukung kehidupan sehari-hari (seperti akses kesehatan, hiburan, atau pendidikan anak) di lingkungan sekitar madrasah masih sangat terbatas. Dengan demikian, meskipun infrastruktur dasar tersedia, kurangnya ekosistem pendukung yang komprehensif tetap menjadi penghalang retensi tenaga pendidik.

Melihat data ini secara holistik, dapat disimpulkan bahwa isu rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik di daerah terpencil Papua tidak hanya sebatas pada kesulitan penempatan, tetapi juga mencakup tantangan retensi yang kompleks. Rasio guru-siswa yang “ideal” mungkin menutupi masalah distribusi guru yang tidak merata atau kurangnya motivasi guru untuk bertahan di lokasi dengan fasilitas pendukung terbatas. Jumlah MAN yang minim di seluruh Papua, ditambah dengan lokasi yang sulit dijangkau, memperparah masalah ini. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah dan kementerian terkait per-

lu tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah guru, tetapi juga pada penyediaan insentif yang komprehensif, pembangunan fasilitas pendukung di sekitar madrasah, serta program pengembangan profesional berkelanjutan yang disesuaikan dengan konteks dan tantangan unik di daerah terpencil Papua.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan yang komprehensif memerlukan penelusuran peraturan perundang-undangan yang relevan secara cermat. Penelusuran ini menjadi fondasi untuk memahami kerangka hukum yang melingkupi problem statement yang dikaji, mengidentifikasi celah atau tumpang tindih regulasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan dapat diterapkan. Berikut beberapa peraturan yang mendukung kajian antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi secara jelas menjamin hak atas pendidikan dan mengamanatkan negara untuk mengalokasikan anggaran demi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Keterbatasan fasilitas di Papua menunjukkan bahwa pemenuhan amanat konstitusi ini masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam pemerataan akses dan kualitas infrastruktur pendidikan. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat (1) menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Selanjutnya Pasal 31 Ayat (3) menyatakan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Pasal 31 Ayat (4) menyatakan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945)

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

Undang-undang Sisdiknas secara eksplisit menyebutkan pentingnya sarana dan prasarana sebagai salah satu standar nasional pendidikan. Keterbatasan fasilitas di Papua adalah pelanggaran terhadap semangat keadilan pendidikan dan pemenuhan standar sarana dan prasarana yang diamanatkan undang-undang ini. Pasal 4 Ayat (1) menyatakan “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Selanjutnya Pasal 5 Ayat (1) menyatakan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Serta Pasal 35 Ayat (1) menyatakan “Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala”. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (diubah menjadi PP No. 4 Tahun 2022)

Peraturan ini merinci lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan di Indonesia, termasuk luas minimum ruang kelas, ketersediaan perpustakaan, laboratorium, kamar mandi, dan fasilitas lain. Banyak sekolah di Papua, terutama di daerah terpencil, yang jauh dari pemenuhan standar minimum yang diatur dalam peraturan pemerintah ini. Ini menunjukkan ketimpangan dalam implementasi standar nasional. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2021).

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2021)

Undang-Undang Otsus memberikan kewenangan dan alokasi dana khusus kepada Provinsi Papua untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya, termasuk di sektor pendidikan. Meskipun ada dana Otsus, masalah infrastruktur pendidikan masih persisten. Ini menunjukkan tantangan dalam pengelolaan dana, prioritas pembangunan, atau hambatan implementasi di lapangan seperti kondisi geografis dan kapasitas pemerintah daerah. (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 2001).

Limitasi Kajian

Kajian ini tidak luput dari beberapa limitasi yang perlu diakui untuk memastikan interpretasi temuan yang transparan dan akurat. Keterbatasan utama meliputi akses data yang kurang komprehensif, terutama terkait informasi terkini dan detail operasional pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang mungkin tidak tercakup dalam data sekunder atau survei yang dilakukan secara terbatas.

Selain itu, analisis ini didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu mengenai kondisi lapangan dan respons stakeholder, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan realitas kompleks pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Ruang lingkup isu kebijakan juga dibatasi hanya pada aspek ketersediaan fasilitas pendukung dan tantangan tenaga pendidik, sehingga belum mencakup dimensi kebijakan pendidikan Islam yang lebih luas.

Potensi bias dalam pengumpulan dan interpretasi informasi dari responden survei, serta ketergantungan pada data mandiri yang diinput oleh pihak madrasah (Emis), juga dapat memengaruhi objektivitas temuan.

Kebaruan/Kontribusi

Makalah kebijakan ini memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan makalah kebijakan pendidikan pada umumnya, terutama karena fokusnya yang spesifik pada konteks Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Papua. Berikut adalah beberapa poin yang membedakan makalah kebijakan ini:

1. Makalah kebijakan ini secara khusus menyoroti tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah Papua, yang memiliki kondisi geografis yang sulit dan keragaman sosial-budaya yang khas, seperti kondisi geografis terpencil, keterbatasan infrastruktur, dan perbedaan budaya dalam menganalisis kebijakan pendidikan.
2. Makalah kebijakan ini secara khusus berfokus pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Papua, yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam sistem pendidikan nasional.
3. Makalah kebijakan ini memberikan perhatian khusus pada upaya pemerataan pendidikan di Papua.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis kebijakan, maka pada makalah kebijakan ini, penulis mengajukan 3 (tiga) alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk menjawab masalah utama rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Papua sebagai berikut:

1. **Optimalisasi Anggaran dan Tata Kelola Infrastruktur**
Kebijakan ini fokus pada peningkatan alokasi anggaran, efisiensi penggunaan, dan perbaikan tata kelola dana khusus untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas MAN di Papua, dengan mekanisme yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal.
2. **Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Madrasah Adaptif dan Berbasis Komunitas**
Kebijakan ini mendorong pembangunan dan rehabilitasi fasilitas MAN dengan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi geografis Papua, memanfaatkan material dan kapasitas lokal, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
3. **Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Akses Fasilitas Pembelajaran**
Meskipun tidak menggantikan fasilitas fisik, kebijakan ini mengintegrasikan pemanfaatan teknologi digital untuk mengurangi dampak keterbatasan fasilitas fisik tertentu, terutama akses terhadap sumber belajar dan informasi.

Untuk mengidentifikasi alternatif kebijakan yang paling tepat dan efektif dalam merespons problem statement yang dikaji, penulis menggunakan kerangka analisis kebijakan William N. Dunn. Pendekatan Dunn dikenal karena strukturnya yang sistematis, memungkinkan evaluasi komprehensif terhadap berbagai opsi kebijakan sebelum pengambilan keputusan

Penulis melakukan survey kembali dengan responden tenaga pendidik pada Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Papua dengan rentang waktu 27 Mei – 01 Juni 2025 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Skoring Pemilihan Alternatif Kebijakan

Kriteria / Alternatif	Alternatif 1: Optimalisasi Anggaran & Tata Kelola	Alternatif 2: Pembangunan Adaptif & Berbasis Komunitas	Alternatif 3: Pemanfaatan Teknologi Digital
1. Efektivitas	3,80	3,69	3,64
(Memiliki potensi tinggi untuk mengatasi akar masalah finansial dan manajemen, yang krusial untuk perbaikan fasilitas secara sistematis).	(Langsung menjawab kebutuhan fisik dengan solusi yang relevan dan berkelanjutan, paling efektif dalam menciptakan lingkungan belajar fisik yang layak).	(Efektif dalam meningkatkan akses informasi dan sumber belajar, tetapi tidak secara langsung mengatasi masalah fisik bangunan atau sanitasi).	(Langsung menjawab kebutuhan fisik dengan solusi yang relevan dan berkelanjutan, paling efektif dalam menciptakan lingkungan belajar fisik yang layak).
2. Efisiensi	3,86	3,46	3,50
(Potensi efisien jika tata kelola baik, namun proses birokrasi dan pengawasan bisa memakan sumber daya jika tidak dioptimalkan).	(Efisiensi baik untuk akses informasi luas, tetapi investasi awal teknologi bisa tinggi, dan efisiensi tidak berlaku untuk kebutuhan fasilitas fisik dasar).	(Cukup efisien karena memanfaatkan sumber daya dan tenaga lokal, mengurangi biaya transportasi dan material dari luar. Potensi mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang).	(Cukup efisien karena memanfaatkan sumber daya dan tenaga lokal, mengurangi biaya transportasi dan material dari luar. Potensi mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang).
3. Kecukupan	3,50	3,71	3,36
(Cukup memadai karena menyentuh masalah pendanaan yang fundamental, namun tidak langsung menyelesaikan pembangunan fisik tanpa implementasi lanjutan).	(Tidak cukup untuk mengatasi masalah fasilitas secara menyeluruh karena hanya menyentuh aspek akses informasi, bukan fisik dasar seperti ruang kelas atau sanitasi).	(Cukup memadai karena langsung menyediakan solusi fisik yang dibutuhkan, tetapi mungkin tidak menjangkau seluruh wilayah secara cepat atau mengatasi masalah non-fisik).	(Tidak cukup untuk mengatasi masalah fasilitas secara menyeluruh karena hanya menyentuh aspek akses informasi, bukan fisik dasar seperti ruang kelas atau sanitasi).
4. Pemerataan	3,69	3,50	3,43
(Potensi untuk mendorong pemerataan jika alokasi anggaran khusus difokuskan pada daerah yang paling tertinggal, tetapi pelaksanaan bisa terhambat birokrasi).	(Sangat tinggi, teknologi memungkinkan akses sumber daya pembelajaran yang sama bagi siswa di lokasi terpencil sekalipun, mengatasi batasan geografis).	(Potensi pemerataan tinggi karena fokus pada pembangunan di lokasi, memungkinkan pemerataan fasilitas fisik ke daerah terpencil jika diimplementasikan secara merata).	(Potensi pemerataan tinggi karena fokus pada pembangunan di lokasi, memungkinkan pemerataan fasilitas fisik ke daerah terpencil jika diimplementasikan secara merata).
5. Responsivitas	3,57	3,71	3,57
(Responsif terhadap kebutuhan dana, tetapi mungkin kurang langsung responsif terhadap preferensi spesifik masyarakat terkait desain atau pemeliharaan jika tidak ada partisipasi).	(Cukup responsif terhadap kebutuhan akan informasi dan pembelajaran modern bagi siswa dan guru di daerah yang sebelumnya terisolasi).	(Sangat responsif karena melibatkan komunitas lokal dalam desain dan pemeliharaan, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi setempat).	(Cukup responsif terhadap kebutuhan akan informasi dan pembelajaran modern bagi siswa dan guru di daerah yang sebelumnya terisolasi).

Kriteria / Alternatif	Alternatif 1: Optimalisasi Anggaran & Tata Kelola	Alternatif 2: Pembangunan Adaptif & Berbasis Komunitas	Alternatif 3: Pemanfaatan Teknologi Digital
6. Ketepatan	3,57	3,57	3,57
(Sangat tepat, sejalan dengan amanat konstitusi dan UU Otsus untuk pemerataan pembangunan dan penggunaan anggaran yang akuntabel).	(Cukup tepat, sejalan dengan visi transformasi digital pendidikan nasional, namun perlu disesuaikan dengan infrastruktur dasar yang masih terbatas).	(Cukup tepat, sejalan dengan visi transformasi digital pendidikan nasional, namun perlu disesuaikan dengan infrastruktur dasar yang masih terbatas).	(Sangat tepat, selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas Papua, serta mendukung keberlanjutan lingkungan).
TOTAL SKOR	21,99	21,64	21,07

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas, maka skoring kriteria alternatif kebijakan dalam makalah kebijakan yang terpilih sebagai rekomendasi kebijakan adalah:

1. Optimalisasi Anggaran dan Tata Kelola Infrastruktur : 21,99
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Madrasah Adaptif dan Berbasis Komunitas: 21,64
3. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Akses Fasilitas Pembelajaran : 21,07

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan analisis skoring kriteria alternatif kebijakan menggunakan teori William N. Dunn, sebuah kesimpulan penting telah dirumuskan: kebijakan Optimalisasi Anggaran dan Tata Kelola Infrastruktur menjadi jawaban paling strategis terhadap permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di Provinsi Papua, khususnya terkait fasilitas Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Ini menunjukkan bahwa inti persoalan bukan hanya pada ketiadaan fisik, melainkan pada pondasi pendanaan dan manajemen yang belum kokoh. Tanpa perbaikan fundamental pada aspek ini, upaya pembangunan fisik yang masif sekalipun berpotensi mengalami kebocoran, inefisiensi, atau bahkan kegagalan untuk berkelanjutan.

Prioritas pada optimalisasi anggaran berarti Kementerian Agama perlu meninjau ulang alokasi dana, memastikan transparansi dalam setiap pengeluaran, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan proyek. Hal ini mencakup langkah-langkah seperti penyusunan rencana anggaran yang lebih realistis dan berpihak pada kebutuhan riil MAN di Papua, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat Kanwil Kemenag Papua dalam mengelola dana dan proyek infrastruktur. Dengan dasar finansial dan manajerial yang kuat, pembangunan fisik dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan minim risiko penyimpangan.

Meski kebijakan pembangunan adaptif dan pemanfaatan teknologi digital juga penting, keduanya akan sulit diimplementasikan secara maksimal tanpa adanya dukungan anggaran

yang optimal dan tata kelola yang efektif. Optimalisasi anggaran dan tata kelola adalah kunci pembuka bagi solusi-solusi lain. Kebijakan ini akan menciptakan ekosistem yang sehat bagi investasi pendidikan, memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif yang signifikan dan berkelanjutan bagi fasilitas MAN, dan pada akhirnya, meningkatkan kualitas pendidikan di tanah Papua.

Rekomendasi

Berdasarkan pilihan kebijakan yang paling strategis di atas, maka penulis merekomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua menginisiasi pengusulan anggaran berbasis kebutuhan riil dan prioritas utamanya fasilitas pendukung seperti hunian bagi tenaga pendidik yang bersumber dari berbagai sumber pendanaan, baik Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Pemerintah Daerah melalui alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) serta kemitraan dengan swasta

REFERENSI

- Jurnal Evaluasi Pendidikan. 2021. "Analisis Capaian Pembelajaran Siswa Madrasah Aliyah di Papua: Studi Komparatif Antarprovinsi." Vol. 13(2):87–100.
- Jurnal Geografi Papua. 2022. "Dampak Aksesibilitas Geografis terhadap Kehadiran Siswa Madrasah di Pegunungan Papua." Vol. 4(1):22–35.
- Jurnal Hukum dan Pendidikan. 2022. "Otonomi Pendidikan Madrasah di Papua: Tantangan Implementasi Kebijakan Khusus." Vol. 9(1):10–24.
- Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam. 2023. "Kesenjangan Digital dalam Pembelajaran Madrasah Aliyah di Papua: Tantangan dan Solusi." Vol. 5(1):45–58.
- Jurnal Kebijakan Publik. 2023. "Efektivitas Alokasi Anggaran Pendidikan Madrasah di Provinsi Papua: Analisis dan Rekomendasi." Vol. 11(3):270–85.
- Jurnal Pembangunan Sosial. 2023. "Pendidikan sebagai Instrumen Peningkatan Kualitas Hidup dan Pengentasan Kemiskinan di Papua." Vol. 7(4):330–45.
- Jurnal Pendidikan Islam. 2022. "Infrastruktur Pendidikan Madrasah di Wilayah Timur Indonesia: Studi Kasus MAN Papua." Vol. 10(2):112–25.
- Jurnal Pendidikan Islam. 2024. "Masa Depan Pendidikan Madrasah di Papua: Strategi Peningkatan Kualitas Menuju Indonesia Emas." Vol. 12(1):1–15.
- Jurnal Pendidikan Madrasah. 2020. "Pengembangan Kurikulum Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal untuk Madrasah di Papua." Vol. 8(4):310–25.
- Jurnal Penelitian Pendidikan. 2020. "Metode Pengumpulan Data untuk Riset Pendidikan di Wilayah Terpencil Papua." Vol. 12(3):200–215.
- Jurnal Sosiologi Pendidikan. 2021. "Peran Komunitas dan Keluarga dalam Mendukung Pendidikan Madrasah di Masyarakat Adat Papua." Vol. 6(2):150–65.
- Jurnal Studi Pendidikan Islam. 2021. "Kompetensi Guru Madrasah Aliyah di Daerah Terpencil: Analisis Kebutuhan Pelatihan di Papua." Vol. 7(3):201–15.
- Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua. 2025. *Statistik 2024 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 2001.

LAMPIRAN 1. Tabel Urgency, Seriousness, Growth (USG)

No	Masalah Pokok	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Total Skor (U+S+G)	Prioritas
1	Kurangnya Infra-struktur pendu-kung pem-belaja-ran serta sulitnya aksesibi-litas lokasi satuan pendidikan	4	5	4	13	Tinggi
	(Kondisi bangun-an sekolah, fasili-tas dasar, listrik, inter-net, jalan, transportasi yang sulit dan mahal).	Perlunya sege-ra penyediaan fasilitas layak agar proses belajar mengajar tidak terhambat dan merata di seluruh wilayah.	Berpengaruh langsung pada kualitas pem-belajaran, akses siswa/ guru, dan lingkungan belajar yang tidak kondusif.	Jika tidak diper-baiki, kesenjangan infrastruktur akan semakin lebar dan mem-persulit pemerataan pendidikan di masa depan.		
2	Rendahnya kuali-tas dan kuantitas tenaga pendidik	5	5	5	15	Sangat Tinggi
	(Kekurangan guru, kompetensi guru yang belum memadai, enggan bertugas di dae-rah terpencil).	Guru adalah ujung tombak pendi-dikan. Kualitas guru harus segera ditingkatkan dan distribu-sinya diratakan untuk men-jamin stan-dar pembelajaran.	Dampak lang-sung pada hasil belajar siswa, kompe-tensi lulusan, dan ke-mampuan siswa untuk bersaing. Ini adalah fonda-si utama pendi-dikan.	Jika tidak ada penanganan, akan terjadi krisis guru ber-kualitas di masa mendatang, memperparah kesenjangan pendidikan dan menciptakan generasi yang kurang kompe-ten.		
3	Kurang mendu-kungnya faktor sosial, budaya dan keamanan	4	5	4	13	Tinggi
	(Penutupan se-kolah, pengung-sian, kerusakan fasilitas).	Perlu segera dicip-takan lingkungan yang aman dan damai agar proses pendidikan dapat berjalan tanpa hambatan dan trauma.	Dampak serius pada psikologis siswa dan guru, hilang-nya waktu belajar, kersa-kan fasilitas, dan ketidak-pastian masa depan pendidi-kan di wilayah terdam-pak.	Jika konflik berlanjut, pen-didikan akan lumpuh di area terdampak dan menyebabkan hilangnya satu generasi anak Papua yang terdidik.		

No	Masalah Pokok	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Total Skor (U+S+G)	Prioritas
4	Rendahnya tata kelola dan kebijakan satuan pendidikan	3	4	3	10	Sedang
	(Efektivitas alokasi anggaran, transparansi, manajemen program).	Perlu adanya perbaikan sistematis dalam tata kelola untuk memastikan sumber daya dialokasikan dengan tepat dan program berjalan efektif.	Menyebabkan inefisiensi anggaran, program yang tidak tepat sasaran, dan kurangnya akuntabilitas yang menghambat perbaikan kualitas pendidikan.	Jika dibiarkan, masalah ini akan terus menghambat implementasi kebijakan yang baik dan memperlambat kemajuan pendidikan, meskipun ada alokasi dana.		

Berdasarkan tabel analisa *Urgency*, *Seriousness*, *Growth* USG di atas, maka masalah pokok “Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik” mendapatkan skor tertinggi pada masing-masing aspek yaitu urgency 5 poin, seriousness 5 poin dan Growth 5 poin, sehingga total keseluruhan mendapatkan 15 poin.